

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (faisal,2003:17). Pengertian Bank diatas mencerminkan dua peran bank baik sebagai financial intermediate maupun institute of economic development. Sebagai perantara keuangan (*financial intermediate*) bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang surplus dana dalam berbagai bentuk simpanan. Melalui penghimpunan dana, bank membayar bunga kepada masyarakat atau nasabah penyimpan.

Bank menyalurkan dana tersebut (bagian terbesar) dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang defisit dana (faisal,2003:17). Pada sisi penyaluran dana (*Landing of Fund*), kredit merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya (faisal,2013: 72).

Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah yaitu bank bumi daya, bank dagang Negara, bank ekspor impor Negara, dan bank pembangunan Indonesia di lebur menjadi bank mandiri, dimana bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam peran perekonomian Indonesia. Mulanya keempat bank ini dinyatakan valid dan sekarang berkembang menjadi maju ([www.bankmandiri.com](http://www.bankmandiri.com)).

Di bank Mandiri terdapat berbagai produk kredit dan salah satunya yaitu kredit usaha mikro (KUM). Kredit usaha mikro adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif baik untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan modal kerja (Bankmandiri,2013).

Di dalam pemberian kredit suatu usaha seorang kreditur harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Bank Mandiri. Persyaratan tersebut yaitu usia, usaha yang sudah dijalankan (minimal 2thn), jaminan, dokumen. Menurut Bank mandiri cabang batu permasalahannya yang sering dialami yaitu terdapat pada masalah persyaratan. Masyarakat masih sebatas tahu hanya tentang jaminan, tetapi lebih dari sekedar itu. Terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam peminjaman modal usaha bukan hanya jaminan. Masalah inilah yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut.

Dalam pengendalian kredit diperlukan adanya pengendalian intern agar terhindar dari segala bentuk resiko dan penyelewangan yang mungkin terjadi. Pengendalian internal adalah sebuah proses karena ia menyebar ke seluruh aktivitas pengoprasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen (Romney dan Steinbart, 2015). Pengendalian internal memberikan jaminan memadai- jaminan menyeluruh yang sulit dicapai dan terlalu mahal.

Menurut Annisa (2012) dalam hasil penelitiannya tentang sistem pengendalian internal terhadap pemberian kredit menyebutkan

permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam sistem pengendalian internal pemberian kredit yaitu pemeriksaan dan pemantauan kredit yang dilakukan hanya sesekali tidak sesering mungkin, dan tidak adanya laporan tentang perkembangan usaha nasabah. Sama juga penelitian menurut Riska (2013) dalam hasil penelitiannya tentang sistem pengendalian internal terhadap pemberian kredit juga menyebutkan permasalahan-permasalahan yang sama yaitu pemeriksaan dan pemantauan kredit yang dilakukan hanya sesekali tidak sesering mungkin, dan tidak adanya laporan tentang perkembangan usaha nasabah. Dalam penelitian terdahulu tidak menjelaskan detail tentang masalah persyaratan pemberian kredit. Atas kajian penelitian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian pada permasalahan dan objek berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan tentang sistem pengendalian intern Kredit Usaha Mikro (KUM) di Bank Mandiri Cabang Kota Batu dapat disimpulkan permasalahan yaitu berdasarkan analisis dapat disimpulkan pengendalian internal pada pemberian Kredit Usaha Mikro (KUM) di Bank Mandiri Cabang Kota Batu sudah baik. Karena dalam proses pemberian Kredit Usaha Mikro (KUM) harus melalui proses persaringan yang banyak untuk memastikan kelayakan pada calon debitur yang akan diberikan pemberian kredit mikro. Mengenai permasalahan rendahnya kredit macet yang terjadi dikarenakan Bank Mandiri sudah meningkatkan pengendalian

internalnya dengan berbagai upaya dan serius dalam mengantisipasi resiko kredit bermasalah atau kredit macet .Berdasarkan analisis dapat disimpulkan pengendalian internal pada pemberian Kredit Usaha Mikro (KUM) di Bank Mandiri Cabang Kota Batu sudah efektif.Bisa dikatakan demikian karena pada proses pemberian kredit mikro dari awal hingga akhir memerlukan waktu maksimal 7 hari kerja dan dalam prosesnya rata-rata dapat diselesaikan tepat waktu. Namun terdapat permasalahan yang harus diperbaiki Bank Mandiri cabang Kota batu yaitu pemisahan tugas yang dilakukan Mikro Kredit Analis (MKA) supaya dalam menganalisis Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) lebih tepat dan efektif.

Penelitian ini penting dilaksanakan karena pemberian kredit akan menimbulkan resiko, oleh sebab itu pemberiannya harus benar-benar teliti dan memenuhi persyaratan. Untuk menjelaskan kemungkinan terjadinya masalah pada persyaratan pemberian kredit modal usaha maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “ Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Usaha Mikro (Studi Kasus pada PT. Bank Mandiri Cabang Batu) ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit usaha mikro di Bank Mandiri cabang Kota Batu ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Menganalisis bagaimana sistem pengendalian internal pemberian kredit usaha mikro di Bank Mandiri cabang Kota Batu.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk memberikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dan masukan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal pada usaha mikro terutama dalam pemberian kredit usaha mikro.
2. Untuk memberikan informasi dan referensi guna mengembangkan penelitian terdahulu dan dapat digunakan sebagai penunjang informasi bagi penelitian selanjutnya terkait penelitian mengenai sistem pengendalian internal terlebih untuk sistem pengendalian internal terhadap pengajuan kredit usaha mikro.